



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



---

# KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

---



**Garis-Garis Besar Kurikulum**  
**Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019**  
**Bagi Komisi Pemilihan Umum**

No.	Materi	Sub Materi	Durasi	Metode	Narasumber
1.	<b>Advokasi Sengketa Perselisihan Pemilihan Umum Tahun 2019</b> (Materi Lain Sesuai Kebutuhan KPU)	a. Sengketa Proses: 1) Pelanggaran Administrasi 2) Sengketa Pemilihan 3) Sengketa TUN Pemilihan 4) Pelanggaran Administrasi Politik Uang b. Pelanggaran Kode etik c. Tindak Pidana Pemilihan d. Perselisihan Hasil Pemilihan umum e. Potensi dan Penanganan sengketa dalam <i>electoral process</i>	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab	- Anggota KPU
2.	<b>Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	a. Mekanisme Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan b. Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan c. Potensi dan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, dan Sengketa Tata Usaha Negara.	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab	- Anggota Bawaslu
3.	<b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden d. Ketentuan Permohonan Pemohon : 1) <i>Legal Standing</i> Pemohon 2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan	3 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab	- Hakim Konstitusi

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3) Pokok Permohonan</li> <li>4) <i>Petitum</i></li> <li>e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan Pendahuluan</li> <li>2) Pemeriksaan Persidangan</li> <li>3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli</li> <li>4) Putusan Sela</li> </ul> </li> <li>e. Putusan Mahkamah Konstitusi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengambilan Putusan</li> <li>2) Sistematika Putusan</li> </ul> </li> <li>g. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</li> </ul>			
4.	<b>Mekanisme, Tahapan, dan Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.</li> <li>b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya. <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Secara Langsung</li> <li>2) Secara <i>Online</i></li> </ul> </li> <li>c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan</li> <li>d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait</li> <li>e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh</li> <li>f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan</li> </ul>	2 x 60 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya Jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitera</li> <li>- Panitera Muda</li> </ul>
5.	<b>Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Nama dan Alamat Termohon</li> <li>2) Uraian yang Jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Permohonan Pemohon</li> <li>b) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon</li> <li>c) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 x 60 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya Jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitera Pengganti</li> </ul>

		d) Pokok Permohonan Pemohon 3) Permintaan ( <i>Petitum</i> ) Termohon b. Contoh Penyusunan Jawaban Termohon			
6.	<b>Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019</b>	Setiap peserta melakukan Praktik penyusunan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019	2 x 60 menit	Praktik	- Panitera Pengganti - Pusdik
7.	<b>Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, Presiden, dan Wakil Presiden Tahun 2019</b>	Setiap peserta melakukan Praktik penyusunan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD, Presiden, dan Wakil Presiden Tahun 2019	2 x 60 menit	Praktik	- Panitera Pengganti - Pusdik
8.	<b>Presentasi Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	Perwakilan Peserta memaparkan hasil penyusunan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon untuk mendapat tanggapan dan koreksi dari Narasumber/Fasilitator	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab - Praktik	- Panitera Pengganti
9.	<b>Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	a. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara <i>online</i> b. Informasi Perkembangan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 c. Persidangan Jarak Jauh ( <i>video conference</i> ) d. Putusan dan Penyampaian Salinan Putusan	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab - Praktik	- Pusat TIK - Pusdik

**Garis-Garis Besar Kurikulum**  
**Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019**  
**Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum**

No.	Materi	Sub Materi	Durasi	Metode	Narasumber
1.	<b>Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</b> <i>(Materi Lain sesuai Kebutuhan Bawaslu)</i>	a. Mekanisme Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan b. Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan c. Potensi dan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, dan Sengketa Tata Usaha Negara.	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab	- Anggota Bawaslu
2.	<b>Potensi Problematika dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	a. Sengketa Proses: 1) Pelanggaran Administrasi 2) Sengketa Pemilihan 3) Sengketa TUN Pemilihan 4) Pelanggaran Administrasi Politik Uang b. Pelanggaran Kode etik c. Tindak Pidana Pemilihan d. Perselisihan Hasil Pemilihan umum e. Potensi dan Penanganan sengketa dalam <i>electoral process</i>	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab	- Anggota KPU
3.	<b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden d. Ketentuan Permohonan Pemohon : 1) <i>Legal Standing</i> Pemohon	3 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab	- Hakim Konstitusi - Panitera

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan</li> <li>3) Pokok Permohonan</li> <li>4) <i>Petitum</i></li> </ul> <p>e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan Pendahuluan</li> <li>2) Pemeriksaan Persidangan</li> <li>3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli</li> <li>4) Putusan Sela</li> </ul> <p>f. Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengambilan Putusan</li> <li>2) Sistematika Putusan</li> </ul> <p>h. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</p>			
4.	<b>Mekanisme, Tahapan, dan Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.</li> <li>b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya. <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Secara Langsung</li> <li>2) Secara <i>Online</i></li> </ul> </li> <li>c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan</li> <li>d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait</li> <li>e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh</li> <li>f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan</li> </ul>	2 x 60 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya Jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitera</li> <li>- Panitera Muda</li> </ul>
5.	<b>Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Nama dan Alamat</li> <li>2) Uraian yang Jelas mengenai Keterangan Bawaslu terhadap Permohonan Pemohon</li> <li>3) Laporan Pengawasan Bawaslu Terhadap Proses Pelaksanaan Pemilu 2019</li> </ul> </li> </ul>	2 x 60 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya Jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitera Pengganti</li> </ul>

		b. Contoh Penyusunan Keterangan Bawaslu			
6.	<b>Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019</b>	Setiap peserta melakukan Praktik penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019	2 x 60 menit	Praktik	- Panitia Pengganti - Pusdik
7.	<b>Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, Presiden, dan Wakil Presiden Tahun 2019</b>	Setiap peserta melakukan Praktik penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD, Presiden, dan Wakil Presiden Tahun 2019	2 x 60 menit	Praktik	- Panitia Pengganti - Pusdik
8.	<b>Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	a. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara <i>online</i> b. Informasi Perkembangan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 c. Persidangan Jarak Jauh ( <i>video conference</i> ) Putusan dan Penyampaian Salinan Putusan	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab Praktik	- Pusat TIK - Pusdik
9.	<b>Presentasi Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	Perwakilan Peserta memaparkan hasil penyusunan Keterangan Bawaslu untuk mendapat tanggapan dan koreksi dari Narasumber/Fasilitator	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab - Praktik	- Panitia Pengganti

**Garis-Garis Besar Kurikulum**  
**Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019**  
**Bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum**

No.	Materi	Sub Materi	Durasi	Metode	Narasumber
1.	<b>Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	a. <i>Grand Design</i> Pemilihan Umum Tahun 2019 b. Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 c. Potensi dan Mekanisme Penanganan sengketa dalam <i>electoral process</i>	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab	- KPU
2.	<b>Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	a. Mekanisme Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan b. Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan c. Potensi dan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, dan Sengketa Tata Usaha Negara	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab	- Bawaslu
3.	<b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD d. Ketentuan Permohonan Pemohon : 1) <i>Legal Standing</i> Pemohon 2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 3) Pokok Permohonan 4) <i>Petitum</i> e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 1) Pemeriksaan Pendahuluan 2) Pemeriksaan Persidangan 3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli	3 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab	- Hakim Konstitusi - Panitera



		<ul style="list-style-type: none"> <li>4) Putusan Sela</li> <li>f. Putusan Mahkamah Konstitusi</li> <li>g. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengambilan Putusan</li> <li>2) Sistematika Putusan</li> </ul> </li> </ul>			
4.	<b>Mekanisme, Tahapan, dan Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019.</li> <li>b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya. <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Secara Langsung</li> <li>2) Secara <i>Online</i></li> </ul> </li> <li>c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan</li> <li>d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait</li> <li>e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh</li> <li>f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan</li> </ul>	2 x 60 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya Jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitera</li> <li>- Panitera Muda</li> </ul>
5.	<b>Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Permohonan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon</li> <li>b. Identitas Lengkap Pemohon</li> <li>c. Uraian yang Jelas Mengenai : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kewenangan Mahkamah</li> <li>2) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon</li> <li>3) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan</li> <li>4) Pokok Permohonan Pemohon</li> <li>5) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon</li> </ul> </li> <li>d. Contoh Penyusunan Permohonan Pemohon</li> </ul> </li> <li>Penyusunan Keterangan Pihak Terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Nama dan Alamat Pihak Terkait</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 x 60 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya Jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitera Pengganti</li> </ul>

		<p>2) Uraian yang Jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon :</p> <p>a) Permohonan Pemohon</p> <p>b) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon</p> <p>c) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan</p> <p>d) Pokok Permohonan Pemohon</p> <p>3) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pihak Terkait</p> <p>d. Contoh Penyusunan Keterangan Pihak Terkait</p>			
6.	<b>Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	Setiap peserta melakukan Praktik penyusunan Permohonan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	2 x 60 menit	Praktik	- Panitera Pengganti - Pusdik
7.	<b>Praktik Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	Setiap peserta melakukan Praktik penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	2 x 60 menit	Praktik	- Panitera Pengganti - Pusdik
8.	<b>Presentasi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	Perwakilan Peserta memaparkan hasil penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk mendapat tanggapan dan koreksi dari Narasumber/Fasilitator	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab - Praktik	- Panitera Pengganti
9.	<b>Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<p>a. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara <i>online</i></p> <p>b. Informasi Perkembangan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>c. Persidangan Jarak Jauh (<i>video conference</i>)</p> <p>d. Putusan dan Penyampaian Salinan Putusan</p>	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab - Praktik	- Pusat TIK - Pusdik

**Garis-Garis Besar Kurikulum**  
**Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019**  
**Bagi Calon Anggota DPD**

No.	Materi	Sub Materi	Durasi	Metode	Narasumber
1.	<b>Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	a. <i>Grand Design</i> Pemilihan Umum Tahun 2019 b. Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 c. Potensi dan Mekanisme Penanganan sengketa dalam <i>electoral process</i>	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab	- KPU
2.	<b>Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	a. Mekanisme Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan b. Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan c. Potensi dan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, dan Sengketa Tata Usaha Negara	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab	- Bawaslu
3.	<b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD d. Ketentuan Permohonan Pemohon : 5) <i>Legal Standing</i> Pemohon 6) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 7) Pokok Permohonan 8) <i>Petitum</i> e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 5) Pemeriksaan Pendahuluan 6) Pemeriksaan Persidangan 7) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli	3 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab	- Hakim Konstitusi - Panitera

		8) Putusan Sela f. Putusan Mahkamah Konstitusi g. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 3) Pengambilan Putusan 4) Sistematika Putusan			
4.	<b>Mekanisme, Tahapan, dan Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019. b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya. 3) Secara Langsung 4) Secara <i>Online</i> c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab	- Panitera - Panitera Muda
5.	<b>Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	Penyusunan Permohonan a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon b. Identitas Lengkap Pemohon c. Uraian yang Jelas Mengenai : 1) Kewenangan Mahkamah 2) Kedudukan Hukum ( <i>legal standing</i> ) Pemohon 3) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 4) Pokok Permohonan Pemohon 5) Permintaan ( <i>Petitum</i> ) Pemohon d. Contoh Penyusunan Permohonan Pemohon Penyusunan Keterangan Pihak Terkait e. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait 1) Nama dan Alamat Pihak Terkait	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab	- Panitera Pengganti

		<p>2) Uraian yang Jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon :</p> <p>e) Permohonan Pemohon</p> <p>f) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon</p> <p>g) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan</p> <p>h) Pokok Permohonan Pemohon</p> <p>3) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pihak Terkait</p> <p>f. Contoh Penyusunan Keterangan Pihak Terkait</p>			
6.	<b>Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	Setiap peserta melakukan Praktik penyusunan Permohonan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD	2 x 60 menit	Praktik	- Panitera Pengganti - Pusdik
7.	<b>Praktik Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	Setiap peserta melakukan Praktik penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD	2 x 60 menit	Praktik	- Panitera Pengganti - Pusdik
8.	<b>Presentasi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</b>	Perwakilan Peserta memaparkan hasil penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk mendapat tanggapan dan koreksi dari Narasumber/Fasilitator	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab - Praktik	- Panitera Pengganti
9.	<b>Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<p>a. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara <i>online</i></p> <p>b. Informasi Perkembangan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>c. Persidangan Jarak Jauh (<i>video conference</i>)</p> <p>d. Putusan dan Penyampaian Salinan Putusan</p>	2 x 60 menit	- Ceramah - Tanya Jawab - Praktik	- Pusat TIK - Pusdik

